



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONY WIDIJARTO PURUBASKORO
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 247016

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.113.667.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/100 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 141.442.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/156 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.560.000.000
3. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 1020 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 505 m2/268 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 3.162.225.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **454.500.000**

1. MOBIL, AUDI SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOBIL, NISSAN ALL NEW XTRAIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. LAINNYA, LANKELEISI E BIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



5. MOTOR, HONDA CB 150 X Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
6. LAINNYA, LANKELEISI E BIKE G660 Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 299.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 15.856.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.609.004.455

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 24.332.671.455

III. HUTANG Rp. 719.854.657

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 23.612.816.798

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.